

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

Stevani Laude¹, Asna Aneta², Ismet Sulila³
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia ^{1,2,3}
E-mail: stevanylaude8@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to investigate (1) the role of communication in the implementation of Keluarga Berencana Family planning program. Policy in Kota Tengah Sub-district, Gorontalo City, (2) the resources involved in the implementation of this policy; (3) the disposition of stakeholders in the policy implementation; and (4) the bureaucratic structure influencing the implementation of Keluarga Berencana in Kota Tengah Sub-district, Gorontalo City. This study employed a descriptive qualitative method and aimed to prove the effectiveness of Keluarga Berencana in Kota Tengah Sub-district, Gorontalo City. The findings indicate that the implementation of Keluarga Berencana Policy in Kota Tengah Sub-district Office, and resource standards have not been identified, including challenges posed by the COVID-19 pandemic, which has altered critical elements, particularly among the target population. Consequently, the researcher posits that addressing Keluarga Berencana's Challenges requires applying George C. Edwart III's structured and efficient implementation theory. This entails the establishment of Standard Operating Procedures (SOPs) and performance standards for policy implementers, alongside ensuring that human resource needs are met in terms of quantity and the educational qualifications of personnel involved at the Kota Tengah Sun-district Office.

Keywords: *Organizational Culture, Quality of Public Services*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan program KB di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. (2) Bagaimana Sumber daya dalam implementasi Kebijakan Program KB di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.(3) Bagaimana Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Program KB di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. (4) Bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Program KB di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan Penelitian ini membuktikan keberhasilan Program KB di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program KB belum mencapai kualitas Implementasi

secara terstruktur dengan efisien. Dari Standar Kinerja yang belum diterapkan di Balai Kecamatan Kota tengah, dan Standar Sumber daya yang belum maksimal. Adapun beberapa hambatan yang dapat menghalangi Program KB berjalan dengan tidak maksimal yakni hambatan yang dapat mengubah seluruh elemen bagi implemetasi itu sendiri sejak beredarnya pandemi COVID 19 yang dapat mengubah seluruh element penting terutama pada kelompok masyarakat (PUS). Dari beberapa penjelasan di atas sehingga peneliti menelisik bahwa untuk menuntaskan program KB ini dengan menggunakan teori George C.Edwart III sebagai tata pelaksanaan suatu implementasi secara terstruktur dan efisien, sehingga penerapan SOP ataupun standar kinerja bagi para pelaksana kebijakan perlu diterapka sebagai landasan keberhasilan kebijakan itu sendiri, tidak hanya SOP melainkan Sumber daya yang perlu dipenuhi dengan kebutuhan kerja berdasarkan kuantitas SDM maupun kuantitas jenjang pendidikan yang di mumpuni oleh implementor di Balai Kecamatan Kota Tengah.

Kata Kunci: *Budaya Organisasi, Kualitas Pelayanan Publik.*

PENDAHULUAN

Horn, 2014 dalam (Apriandi, 2017) menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan individu, otoritas, badan pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dalam implementasi kebijakan tujuan utama terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu implementasi langsung melalui program, atau berbagai rumusan kebijakan yang dikeluarkannya. Adapun variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan antara lain adalah individu, kelompok, dan individu institusi. (Godin 2009) dalam (Sulila, 2021).

Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu dengan mewujudkan suatu kuantitas penduduk yang seimbang agar tidak terjadi kepadatan penduduk yang akan berpengaruh pada lingkungan itu sendiri dilihat berdasarkan data BPS (Badan

Pusat Statistik) pada tahun 2020 sampai 2022. Kepadatan penduduk per tahun berjumlah 2,495 ribu jiwa sejak tahun 2020, di tahun 2021 kepadatan Penduduk naik sebesar 2,510 ribu jiwa dan di tahun 2022 kepadatan penduduk naik lagi sebesar 2.530 ribu jiwa. Angka kepadatan penduduk tersebut lebih tinggi atau bertambah sejak tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2020 (Gorontalo, 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh Yohan dalam (Widya Saputra, 2019), jumlah penduduk Indonesia saat ini menunjukkan kualitas penduduk yang kurang baik apabila kualitas penduduk diimbangi dengan daya dukung lingkungan. Saat ini permasalahan pertumbuhan penduduk tidak hanya berkaitan dengan kekuatan ekologis saja, namun luas wilayah penduduk mempengaruhi persebaran, kualitas penduduk dan jumlah pangan. Komposisi penduduk sebagian besar

adalah generasi muda. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, mulai dari kualitas penduduk hingga struktur penduduk.

Beberapa pendapat di atas sejalan dengan pernyataan (Saipudin et al., 2020) bahwa alasan utama di negara maju dan berkembang sama, yaitu terutama karena masalah demografi. Jumlah ibu melahirkan semakin hari semakin meningkat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga angka kematian ibu dan anak semakin meningkat.

Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun hanya terdapat di daerah yang terdapat 3T yaitu di daerah tertinggal, daerah terpencil dan daerah terdepan. Di setiap daerah, masyarakat miskin menjadi salah satu tujuan program KB, sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai rendahnya taraf hidup, yaitu adanya tingkat kemiskinan pada sejumlah atau sekelompok orang dibandingkan dengan standar hidup pada umumnya. Menurut Soparlan (2006) dalam (Oillia, 2016).

Program KB dibentuk tidak hanya berdasarkan untuk menekan pertumbuhan penduduk saja, akan tetapi program KB juga mengintegrasikan pertumbuhan pertumbuhan penduduk dan mengintegrasikan pengentasan kemiskinan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

potensi dibidang kesehatan maupun perekonomian yang ada di daerah tersebut. Dengan melalui program ini, harapan yang perlu dibangun bagi seorang peneliti agar bisa menumbuhkan inovasi strategis yang baru untuk dijadikan sebagai prioritas program di lapangan (R.Tuhopi, 2021).

Menurut (BKKBN 2023), peran Kementerian kesehatan sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi dan obat-obatan bagi pasangan usia subur. Terdapat pada pasal 1: Pelayanan KB dalam upaya mengatur persalinan, serta mengatur jarak usia melahirkan yang sehat dan terjaga, serta persalinan. Untuk menata pelaksanaa kehamilan melalui promosi, dukungan dan advokasi hak reproduksi, pengelolaan risiko dan permasalahan peserta jaminan kesehatan. Pelayanan KB sebagai alat dalam mengelola keseimbangan penduduk dengan menetralsir dampak pengelolaan efek samping KB dan pencegahannya.

Kini keberhasilan program KB masih juga belum dapat mengatasi jumlah kepadatan penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya, yang menyebabkan setiap tahun jumlah kapasitas penduduk di indonesia semakin padat. Karena, tidak berdampaknya program KB pada masyarakat. Hal ini karena kurangnya ke pekaan masyarakat terhadap pemakaian alat kontrasepsi, pentignya menjaga keseimbangan struktur

penduduk juga menjaga kesehatan reproduksi bagi PUS. (Diannada 2019) dalam (Lettiyani et al., 2020).

Tetapi tidak dapat dipungkiri sejak tahun 2020 kini terjadi dampak perubahan besar dengan beredarnya isu Pandemi covid-19 yang masih merajalela di kalangan masyarakat. Namun, menjadikan pertumbuhan ekonomi masyarakat kian menurun drastis dari pekerja rumah tangga, pengusaha, buruh, dan pekerja kantoran lainnya. Aktivitas pada saat pandemi covid 19 mengalami pembatasan sosial masyarakat dengan yang lainnya, sehingga aktivitas produktif masyarakat kian banyak beraktivitas di rumah. Pertumbuhan penduduk meningkat sejak beredarnya covid 19 yang merajalela. Sehingga mengakibatkan, jumlah angka kehamilan meningkat. Presentase kasus kehamilan tidak diinginkan sebesar 26% BKKBN 2020 dalam (Makalah, 2022).

Sejak pandemi COVID 19 angka kehamilan meningkat, dipengaruhi oleh sbeberapa factor salah satunya adalah kurangnya peminat dalam penggunaan Alkon. Berdasarkan data bahwa terjadinya penurunan jumlah pada penggunaan Alat kontrasepsi sejak bulan februari hingga maret 2020 sejumlah 40% menurunnya penggunaan alat kontrasepsi misalnya implan turun dari 81.062 kini menjadi 51.536, suntik KB 524.989 menjadi 341.109, lalu pada pil KB turun dari 251.619 menjadi 146.767, kondom 31.502 menjadi 19.583 MOP (vasektomi) 2.238 menjadi

1.196 dan MOW (tubektomi) 13.571 menjadi 8.093. (BKKBN dr. Hasto Wardoyo).

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo harus terus diatasi agar tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang ketat. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa telah terjadi jumlah angka kelahiran yang tinggi sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadinya masalah jumlah struktur penduduk yang tidak seimbang antara komposisi penduduk Kota Gorontalo yang berusia 0-4 tahun lebih banyak dibandingkan usia 5-9 tahun.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, hal ini terlihat dari rasio gender di Kota Gorontalo yang kurang dari 100% Maka, terjadi laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah kelahiran yang tinggi berusia 0-4 tahun. (Gorontalo, 2023). Tingkat pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan Kota Tengah dari tahun 2020 sejumlah 27,398 ribu jiwa kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 27,411 ribu jiwa dan ditahun 2022 sebesar 27,466 ribu jiwa. Di kecamatan Kota Tengah terdapat 6 desa diantaranya, kini berdasarkan data BPS bahwa telah terjadi Peningkatan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kota Tengah yang mengakibatkan kurangnya penggunaan Program KB di Kecamatan Kota Tengah. Adapun dilihat dari data terkait Penggunaan

KB aktif pada pasangan usia subur di Kecamatan Kota Tengah. Sehingga dapat dilihat dari table Pengguna KB aktif dan bukan KB aktif.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, hal ini terlihat dari rasio gender di Kota Gorontalo yang kurang dari 100% Maka, terjadi laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah kelahiran yang tinggi berusia 0-4 tahun. (Gorontalo, 2023). Tingkat pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan Kota Tengah dari tahun 2020 sejumlah 27,398 ribu jiwa kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 27,411 ribu jiwa dan ditahun 2022 sebesar 27,466 ribu jiwa. Di kecamatan Kota Tengah terdapat 6 desa diantaranya, kini berdasarkan data BPS bahwa telah terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kota Tengah yang mengakibatkan kurangnya penggunaan program KB di Kecamatan Kota Tengah. Adapun dilihat dari data terkait penggunaan KB aktif pada pasangan usia subur di Kecamatan Kota Tengah. Sehingga dapat dilihat dari tabel pengguna KB aktif dan bukan KB aktif.

Tabel. 1 Jumlah Pengguna KB aktif di Kecamatan Kota tengah, 2020-2022

2020	2021	2022
2382	2278	2149

Sumber: Data, 2022.

Tabel. 2 Jumlah yang tidak menggunakan KB aktif di Kecamatan Kota tengah, 2020-2022

2020	2021	2022
839	949	1131

Sumber: Data, 2022

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo dalam (Zahari et al., 2022) konsep administrasi merupakan pencapaian yang harus di raih oleh pemerintah, sedangkan pernyataan yang dikemukakan oleh (George J.Gordon 2020) Instansi pemerintah mencakup semua peraturan perundang-undangan yang mencakup kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, administratif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan pemerintah. Menurut Edward (Zahari et al., 2022), administrasi publik adalah studi tentang kinerja lembaga pemerintah, personel, biaya, mobilisasi dan manajemen berbagai sistem.

2. Pengertian Implementasi

Menurut Grindel dalam (Akib et al., 2010), implementasi adalah aktivitas manajemen umum yang dapat diperiksa pada setiap tingkat program terlaksana. Proses pelaksanaannya baru dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, sehingga program dibuat sebagai salah

satu jenis kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Akib et al., 2010), implementasi akan efektif apabila ruang lingkup dan tujuannya jelas oleh yang dibuat oleh pemangku kebijakan, sehingga tujuan kebijakan pun jelas sasaran dan tujuan untuk mencapai ukuran atau nilai yang dapat dipahami oleh penerima kebijakan (masyarakat).

Menurut Mclaughlin dan Schubert dalam (Mulyasa, 2021) bahwa Implementasi berkaitan dengan aktivitas dan adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Cara ini mengandung arti bahwa pelaksanaannya bukan sekedar tindakan, melainkan suatu tindakan yang terencana, yang dapat dilaksanakan menurut acuan metode yang konkrit guna mencapai tujuan tindakan.. Adapun dikutip dari (Pasaribu et al) dalam (Akib et al., 2010) Proses pelaksanaan kebijakan setelah penerapan undang-undang oleh suatu badan resmi dilakukan oleh pemerintah

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut (Kurniawan dan Maani, 2020), implementasi kebijakan dikaitkan dengan konsep top-down ang disebut juga pemetaan topdowner atau Fordwar. konsep ini digunakan sebagai indikator utama implementasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan masih lemah karena top-down masih berfokus pada

perspektif yang berbeda sehingga terbatasnya akses terhadap perspektif yang berbeda tersebut.

Van Meter dan Van Horn dalam (Sahoming et al., 2019) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang menghasilkan suatu hasil yang dilakukan oleh individu atau penguasa, termasuk individu, kelompok atau kelompok pada umumnya dan bidang tertentu, digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran terbaru yang mencapai tujuan dengan berdasar pada keputusan konkrit.

Menurut (Sulila, 2021) dalam menuntaskan suatu keberhasilan implementasi kebijakan terdapat 3 variabel yakni 1). Karakteristik masalah (Trackability of the Problem) meliputi: tingkat teknis kesulitan masalah, tingkat pluralitas sasaran, proporsi kelompok sasaran populasi. 2) karakteristik kebijakan (kemampuan statuts untuk implementasi struktur) yang meliputi: kejelasan isi kebijakan, jumlah alokasi Sumber daya keuangan untuk kebijakan, tingkat komitmen Aparatur 3) Kebijakan lingkungan hidup (Variabel non Hukum yang mempengaruhi suatu implementasi) yang meliputi: Kondisi sosial Ekonomi masyarakat dan Komitmen dan keterampilan Aparatur dan pelaksana.

4. Analisis Implementasi Kebijakan

Menurutdye (1981) dalam (hendayani et al., 2021), pemerintah memberdayakan masyarakat ketika pemerintah mengambil alih

dalam membuat kebijakan publik karena setiap kebijakan memiliki dasar nilai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan norma-norma sosial.

Para ahli dan pengamat politik lainnya memberikan komentar mengenai implementasi kebijakan berdasarkan pengamatan dan pendapat mereka. Terlepas dari perspektif dan latar belakang, terdapat kesepakatan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa dihindari. (Bonoma 1984) menegaskan kembali pemahaman ini ketika mereka memperkenalkan model hubungan antara perumusan strategi dan implementasi strategi. Isu-isu yang dikutip digunakan sebagai acuan untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan atau program, dan pada saat yang sama menentukan kriteria untuk mengukur keberhasilannya. (Akib dkk., 2010).

5. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan menurut Thom- as R. Dye dalam (Putra et al., 2020) merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif kewenangan pemerintah yang berdampak pada kebijakan itu sendiri. Menurut Charles Lindblom dan pakar lainnya, untuk memahami proses pembuatan kebijakan, Anda perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses

kebijakan, baik aktor formal maupun informal. (Putra dkk., 2020).

6. Tujuan Program (KB)

Tujuan program KB dibedakan menjadi dua tujuan, dengan tujuan langsung yang dijelaskan sebagai berikut: 1) Tujuan tidak langsung adalah menurunkan angka kelahiran yang tinggi melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang baik dan sehat. Keluarga berkualitas sebaiknya 2) sasaran langsung pasangan usia subur yang menggunakan metode pengendalian kelahiran untuk menurunkan angka kelahiran yang tinggi. (Zahari dkk., 2022).

7. Sasaran strategis program KB

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan janji Presiden 2020-2024 dari Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024. Serta untuk memastikan Visi, misi dan tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atau seluruh program dan kegiatan prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran starategi. (Yusran, 2022).

METODE

Peneliti melakukan penelitian di Balai Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian selama 6 bulan sejak pengambilan data. Peneliti menggunakan Metode Kualitatif

dengan pendekatan deskriptif, Deskriptif ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang secara jelas terkait dengan masalah dan keadaan tertentu secara apa adanya dengan bagaimana penyelenggaraan Implementasi Kebijakan di lokasi penelitian. Untuk melakukan sub fokus peneliti menggunakan Model Implementasi dari George C. Edwart III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Program KB (dari Aspek Komunikasi)

Menurut Edwart III dalam widodo (2010:97) Komunikasi implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi yaitu: 1) *transmisi* ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya secara umum tetapi juga tepat kelompok sasaran. 2) Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan ini tepat pada kelompok sasaran dan mereka mengetahui secara jelas maksud, tujuan serta substansi dari kebijakan publik. sehingga masing-masing suami dan istri mengetahui secara jelas dan bisa mengambil keputusan bersama.

Berdasarkan hasil Penelitian bahwa kebijakan ini sudah tepat pada kelompok sasaran yakni PUS, akan tetapi kejelasan informasi ini terkait dengan memberikan konseling kepada masyarakat khususnya PUS tidak efektif karena di tahun 2020 terjadinya pandemi covid 19 yang menghalangi

pembatasan dan aktifitas sosial sehingga kurangnya edukasi, konseling dan efektifitas pelatihan bagi para kader-kader maupun tenaga kesehatan sehingga memberikan dampak yang begitu besar kepada penerima kebijakan

2. Implementasi Kebijakan Program KB (dari Aspek Sumber daya)

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010: 98), jika masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya secara efektif, terlepas dari kebenaran peraturan perundang-undangan, maka implementasi kebijakan kurang baik.

Sumber daya yang disebutkan di sini adalah semua alat yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Yaitu: 1) Sumber daya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. Berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. 2) Dalam implementasi kebijakan, anggaran mengacu pada modal atau investasi yang cukup dalam suatu program atau kebijakan untuk menjamin implementasi kebijakan tersebut.. 3) sarana adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan

kebijakan. Ini termasuk bangunan, tanah dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa, jumlah kuantitas Sumber daya Manusia yakni PLKB maupun kader-kader kesehatan sudah cukup terpenuhi akan tetapi dengan melalui keterampilan maupun kompetensi tidak sesuai. Karena dari beberapa PPKBD dan Sub PPKBD jenjang pendidikan hanya berdasar kepada lulusan SMA dan bukan Jenjang lulusan sarjana. Begitupun dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh PLKB sebagai tugas penyuluh pun masih ada yang tidak sesuai dengan bidang atau kompetensinya. Misalnya pada tugas fungsional yang dipumpuni oleh Koordinator Penyuluh dari segi jenjang pendidikan hanya lulusan tingkat SMA.

Berdasarkan jumlah Anggaran Pelayanan Faskes distribusi Alat Kontrasepsi di tahun 2020 mengalami penurunan karena faskes pelayanan kesehatan berfokus pada pelayanan pandemi covid19 sehingga jumlah anggaran yang diperlukan pada pelayanan faskes distribusi Alat kontrasepsi cukup berkurang karena kurangnya pemakaian alkon pada PUS di era pandemi covid19. Jumlah anggaran naik pada distribusi balai penyuluhan KB untuk banyak memberikan penyuluhan kepada kader-kader kesehatan terutama bagi

PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD untuk bisa melegitimasi para penyuluh untuk menggerakkan distribusi Alkon kepada masyarakat di era pandemi Covid19. Maka jumlah anggaran diperlukan pada biaya operasional lainnya.

Adapun ditahun 2021 Biaya operasional pelayanan distribusi Alat Kontrasepsi meningkat, dari anggaran Rp9,614.956 meningkat kini menjadi Rp.38.802.000 sejak 2021, sedangkan pada fasilitas Operasional Balai Penyuluhan KB di tahun 2020 Rp.107.878.667 menjadi Rp.73,416.000 artinya bahwa dalam pemenuhan distribusi Alkon meningkat karena banyaknya angka kelahiran di tahun 2020 maka jumlah produksi Alat Kontrasepsi pada PUS banyak digunakan. Berdasarkan uraian di atas dapat dibuktikan dengan data Anggaran Bantuan Operasional KB

3. Implementasi Kebijakan Program. KB (dari Aspek Disposisi)

Menurut George C. Edward III. Sikap pengambil keputusan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Jika seorang pemimpin punya sikap otoritas dan baik, maka ia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan kehendaknya dalam pengambilan keputusan. adapun Faktor-faktor

yang terlibat dalam implementasi kebijakan meliputi: 1) Sikap atau perilaku tersebut jika saat ini tidak melaksanakan kebijakan yang diminta oleh seorang pemimpin maka akan menjadi kendala besar dalam pelaksanaan program, karena ini adalah pilihan seorang bawahan harus mematuhi dan Masyarakat sebagai penerima kebijakan harus mengikuti pedoman yang dirancang untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 2) Insentif merupakan salah satu cara yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan sikap penanggung jawab implementasi kebijakan dengan cara memanipulasi insentif. 3). Pelatihan di tempat kerja bagi mereka yang melaksanakan kegiatan ini..

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengangkatan jabatan bagi penyuluh memang sudah dilakukan pada saat pengangkatan jabatan fungsional yang diadvokasi oleh pemerintah pusat. Akan tetapi bagi para PPKBD di masing-masing Kelurahan mereka hanya di pilih langsung oleh Pihak Kelurahan dan tidak masuk pada jabatan fungsional yang dipilih oleh pemerintah pusat. Sebagai bagian PPKBD ini bekerja secara sukarela dengan mendedikasikan diri mereka untuk bekerja ikhlas dan tidak digaji sebagai penggerak program KB di masing-masing Kelurahan. Mereka hanya mendapatkan biaya atau

insentif yang diberikan oleh OPD KB saat kegiatan Penyuluhan KB berlangsung.

4. Implementasi Kebijakan Program. KB (dari Aspek Struktur Birokrasi)

Berdasarkan penelitian bahwa balai penyuluhan KB di Kecamatan Kota Tengah tidak menerapkan SOP (Standar Operational Procedure) informasi yang didapatkan bahwa balai penyuluhan KB ini hanya berdasar kepada Peraturan BKKBN No.10 tahun 2023 tentang teknis jabatan fungsional. Sehingga peneliti sulit untuk meneliti bagaimana Pencapaian kinerja yang dilakukan oleh para Penyuluh KB agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Akan tetapi berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Kinerja Penyuluh KB di Kecamatan Kota Tengah ini di backup langsung oleh BKKBN Provinsi dengan menggunakan aplikasi E-pisum yang sudah digunakan sejak tahun 2018. Adapun yang dilakukan dalam aplikasi tersebut misalnya seperti standar absen karyawan yang di pantau langsung oleh BKKBN Provinsi, dari jam masuk kantor sampai dengan jam pulang Kantor. Maka dikatakan gagal dan tidak terstruktur Ketika suatu kinerja Organisasi tidak

mempunyai standar ketentuan kinerja bagi Penyuluh KB.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa dari aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan program KB di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada saat pandemi covid-19 dapat menghalangi keefektifan komunikasi secara langsung oleh pihak penyuluh kepada Masyarakat terutama Kelompok Pasangan usia subur (PUS) sehingga kurangnya Komunikasi secara *scientific dan humanistic* artinya pendekatan dalam memahami karakter individu, tetapi sejak pandemi Covid19 memberikan dampak kepada masyarakat yakni *Social distancing* kurangnya interaksi sosial sehingga memberikan penyuluhan kepada masyarakat PUS kini terbatas.

Dilihat dari aspek Sumber daya bahwa terkait dengan adanya fasilitas sarana maupun prasarana sebagai fasilitator dalam menjalankan program sudah cukup lengkap seperti adanya fasilitas kesehatan puskesmas, apotek, klinik, dan posyandu sudah lengkap begitupun dengan sarana yang digunakan bagi para penyuluh. akan tetapi berdasarkan dari segi Anggaran BOKB (bantuan operasional keluarga berencana) kini peneliti sulit untuk memahami operasional yang disusun secara transparansi sehingga tidak dapat mengetahui dengan jelas berapa dana yang dibutuhkan dari setiap kelurahan

yang ada di Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo.

Disposisi yang ada di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan penelitian dilapangan bahwa untuk memberikan loyalitas kerja bagi para penyuluh KB kini harus disesuaikan dengan insentif yang ada. Agar, para penyuluh termotivasi untuk menggerakkan program yang menjadi tujuan tersebut. Tetapi, biaya insentif hanya dapat diterima oleh para penyuluh PPKBD/Sub PPKBD yang bukan merupakan Non PNS, dan tidak memiliki jabatan fungsional.

Struktur Birokrasi kini menjadi perhatian penting bagi peneliti karena pada saat di lokasi penelitian, peneliti mendapatkan bahwa di Balai Kecamatan Kota Tengah tidak menerapkan SOP yang dapat mengukur kinerja bagi para penyuluh, sehingga dikatakan bahwa struktur birokrasi yang ada di Balai Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tidak efektif maupun terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku:

- Arifuddin, M. (2021). faktor yang berhubungan dengan pemilihan alatkontrasepsi hormonal pada pasutri di wilayah kerja puskesmas lampa kecamatan Duampanua kabupaten pinrang 2022.<https://pskm.usu.ac.id/en/profil/tentang-program-studi/sejarah#>
- Mulyasa. (2021). B. Standar Proses Pembelajaran. 11–43.

Kutipan dari jurnal:

Akib, H., Publik, J. A., & Publik, J. A.(2010).jurnal Implementasi Kebijakan: Apa,Mengapa, dan Bagaimana Haedar akib Guru besar ilmu administrasi Universitas Negeri makassar. 1 (1)

Nurdewi, N. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2),297–303. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>

Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara, 16(1), 106–111.

R.Tuhopi. (2021). Jurnal Administro. *Administrasi Publik*, 3(1), 6–11.

Sulila, I. (2021). Government Policies in Alleviating Poverty Problems in Urban Areas Through the Joint Business Group Empowerment Program. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(4), 1–10.

Dokumen Resmi:

Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang).

Gorontalo, B. P. S. kota G. (2023). Statistik Daerah Kota Gorontalo.

Kutipan dari Tesis dan Disertasi:

Yuanita, sri kemala sandi. (2022). evaluasi model CIPP program diklat berjenjang tingkat dasar untukmeningkatkan kompetensi pendidik anak usia dini. הָאָרֶץ, 2(8.5.2017), 2003–2005.

Kutipan dari Dokumen Pemerintah:

UU No. 52 rahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program KB.

BKKBN No 6 Tahun 2020-2024.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga berencana nasional republic Indonesia No.9 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional petugas lapangan Keluarga Berencana.